



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Jabatan : Bupati Luwu Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI LUWU TIMUR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KAB. LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710502 199208 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,46%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	81%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	77,95

Program	Anggaran	Ket
1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.291.192.300,-	APBD
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 30.734.119.565,-	APBD
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 58.543.600	APBD
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 588.557.460,-	APBD
5. Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.153.046.450,-	APBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.026.200.184,-	APBD
Jumlah	Rp. 37.851.659.559,-	

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI LUWU TIMUR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710502 199208 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALFIAN BAKRAN, S.Kom**

Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **GUNTUR HAFID, S.Pd,M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
LUWU TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANGPOL

Pihak Pertama,

SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL

GUNTUR HAFID, S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710502 199208 1 001

ALFIAN BAKRAN, S.Kom

Pangkat : Pembina
Nip : 19800509 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIa
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sekretariat

: Sekretaris

Tahun Anggaran

: 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.026.200.184,-	APBD
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 75.353.003,-	APBD
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 1.986.362.901,-	APBD
3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp. 8.139.900,-	APBD
4.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 59.822.100,-	APBD
5.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 447.337.280,-	APBD
6.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 1.240.385.000,-	APBD
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 106.300.000,-	APBD
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 102.500.000,-	APBD

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KESBANGPOL

Pihak Pertama,
SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL


GUNTUR HAFID, S.Pd,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710502 199208 1 001


ALFIAR BAKRAN, S.Kom
Pangkat : Pembina
Nip : 19800509 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ATIRA USMAN, S.Sos**

Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KAB. LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KESBANGPO

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710502 199208 1 001

Pihak Pertama,
KABID. POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORMAS

ATIRA USMAN, S.Sos

Pangkat : Pembina
Nip : 19710417 200312 2 007

PERJANJIAN KINERJA ESELON III-B
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang : **Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat**
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%
1.1	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100%
1.2.1	Tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	4 Dokumen
1.2.2	Terlaksananya kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	20 Orang

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1.2.3	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Laporan
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%
2.1	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	104 unit
2.2.1	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 30.734.119.565,-	APBD
1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Rp. 30.734.119.565,-	APBD
a. Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Rp. 191.192.000,-	APBD
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,	Rp 30.457142.365,-	APBD

	pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik			
c.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Rp.	75.785.200,-	APBD
II.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	58.543.600,-	APBD
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyatakatan	Rp.	58.543.600,-	APBD
a.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp.	58.543.600,-	APBD
	Jumlah	Rp.	30.792.663.165,-	

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANGPOL



GUNTUR HAFID, S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710502 199208 1 001

Pihak Pertama,

KABID. POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS



ATIRA USMAN, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19710417 200312 2 007



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JULAEHA TALIB**

Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KAB. LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KAB. LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANGPOL

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710502 199208 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG,
DAN KETAHANAN EKOSOSBUD DAN
AGAMA

JULAEHA TALIB

Pangkat : Pembina
Nip : 19661007 198703 2 006

PERJANJIAN KINERJA ESELON III-B
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang : Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan
Tahun Anggaran : 2024
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%
1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan	100%
1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	100 Orang
1.2	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah paskibraka	70 Orang
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%
2.1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%
2.1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social budaya dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	541 Orang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.291.119.300,-	APBD
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 1.291.119.300,-	APBD
a.	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan. Karakter kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Rp. 43.055.900,-	APBD
b.	Pembentukan Paskibraka	Rp. 1.248.136.400,-	APBD
II.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 588.557.460,-	APBD
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya	Rp. 588.557.460,-	APBD
a.	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Rp. 588.557.460,-	APBD
Jumlah		Rp. 1,879,749,760,-	

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANGPOL



GUNTUR HAFID, S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710502 199208 1 001

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG, DAN
KETAHANAN EKOSOSBUD DAN AGAMA



JULAEHA TALIB

Pangkat : Pembina
Nip : 19661007 198703 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HELENA, S.Sos**

Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)
KAB. LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)
KAB. LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KESBANGPOL

Pihak Pertama,
KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710502 199208 1 001

HELENA, S.Sos

Pangkat : pembina
Nip : 19681010 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON III-B
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang

: Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tahun Anggaran

: 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%
1.1.	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%
1.1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	355 orang
1.1.2.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 1.153.046.450,-	APBD
1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Rp. 1.153.046.450,-	APBD
a. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Rp. 1.116.689.750,-	APBD
b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Rp. 36.356.700,-	APBD
Jumlah	Rp. 1.153.046.450,-	

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANGPOL



GUNTUR HAFID, S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710502 199208 1 001

Pihak Pertama,

KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK



HELENA, S.Sos

Pangkat : pembina

Nip : 19681010 200901 2 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMAWATI, SE**

Jabatan : KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KAB.
LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALFIAN BAKRAN, S.Kom**

Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BADAN

Pihak Pertama
KASUBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

ALFIAN BAKRAN, S.Kom
Pangkat : Pembina
Nip : 19800509 200312 1 004

HERMAWATI, SE
Pangkat : Penata
Nip : 19831018 201001 2 018

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVa
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Bagian : **Perencanaan dan Keuangan**
Tahun Anggaran : **2024**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan
4.	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
5.	tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 38.392.300,-	APBD
2. Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	Rp. 4.492.400,-	APBD
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 32.468.303,-	APBD
4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 1.895.421.301,-	APBD
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Rp. 90.941.600,-	APBD
Jumlah	Rp. 2,061,715,904,-	

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL



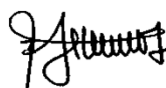
ALFIAN BAKRAN, S.Kom

Pangkat : Pembina

Nip : 19800509 200312 1 004

Pihak Pertama,

KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



HERMAWATI, SE

Pangkat : Penata

Nip : 19831018 201001 2 018



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WATI, S.Kom**

Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KAB.
LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALFIAN BAKRAN, S.Kom**

Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BADAN

Pihak Pertama ,
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ALFIAN BAKRAN, S.Kom

Pangkat : Pembina

Nip : 19800509 200312 1 004

WATI, S.Kom

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19780511 200604 2 030

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IVa
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Sub Bagian : Umum dan Kepegawaian

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan
2.	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	4 dokumen
3.	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang
4.	tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket
5.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 paket
6.	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket
7.	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
8.	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen
9.	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan
10.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
11.	Tersedianya kendaraan dinas / operasional lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit
12.	Tersediannya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	34 Unit
13.	Tersedianya peralatan/mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit
14.	Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 unit
15.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
16.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan
17.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
18.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit
19.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit
20.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
21.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Rp.	8.139.900,-	APBD
2.	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp.	30.262.100,-	APBD
3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp.	29.560.000,-	APBD
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	2.883.720,-	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	42.500.000,-	APBD
6.	Penyediaan bahan logistic kantor	Rp.	7.538.810,-	APBD
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	11.314.750,-	APBD
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	6.720.000,-	APBD
9.	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp.	8.470.000,-	APBD
10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp.	367.910.000,-	APBD
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	1.070.325.000,-	APBD
12.	Pengadaan Mebel	Rp.	28.000.000,-	APBD
13.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	32.500.000,-	APBD
14.	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp.	109.560.000,-	APBD
15.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	1.000.000,-	APBD
16.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	43.500.000,-	APBD
17.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	61.800.000,-	APBD

18. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.	21.000.000,-	APBD
19. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	22.000.000-	APBD
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.	50.000.000,-	APBD
21. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.	9.500.000,-	APBD
Jumlah	Rp.	1,920,984,280,-	

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BADAN

Pihak Pertama ,
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ALFIAR BAKRAN, S.Kom

Pangkat : Pembina

Nip : 19800509 200312 1 004



WATI, S.Kom

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19780511 200604 2 030